

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak di Rutan Kelas II B Wonosari, bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak belum sepenuhnya diberikan sesuai dengan hak anak sebagaimana mestinya, ada kesenjangan waktu antara sedikitnya waktu belajar dengan waktu istirahat yang lebih banyak, petugas pembinaan pendidikan sering tidak hadir untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar, tidak ada pengganti mentor untuk melakukan pembinaan. Sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak masih sebatas kuantitas bukan kualitas.

##### **B. Saran**

1. Anak Didik Perasyarakatan sebaiknya tidak di tempatkan pada Rumah Tahanan Kelas II B Wonosari yang berhubungan dengan Warga Binaan Perasyarakatan karena Anak Didik Perasyarakatan berhak mendapat fasilitas pembinaan pendidikan yang lebih baik. Rumah Tahanan Negara bukanlah tempat pembinaan seperti halnya. Lembaga Perasyarakatan, pemerintah harus serius menangani permasalahan ini.
2. Narapidana Anak sebaiknya mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan narapidana lainnya agar tujuan pembinaan terhadap narapidana anak dapat tercapai.

3. Seharusnya mutu pendidikan senantiasa diperbaharui dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan dijalankan sesuai sistem atau aturan yang sebagaimana mestinya. Lembaga Pemasyarakatan juga semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lapas yang melakukan kontak langsung dengan anak pidana.
4. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari sebaiknya melengkapi fasilitas di bidang pendidikan agar anak didik yang hendak melaksanakan ujian praktek tidak memerlukan pengawalan untuk mengikuti ujian di luar Rutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Asmarawati, Tina, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, 2005, Deepublish, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Cet 3, Edisi 5, Liberty, Yogyakarta.
- Panjaitan, Irwan Pertrus dan Simorangkir Pandapotan. 1995. *Lembaga Per masyarakatan Dalam Prospektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sauri, Sofyan, 2003, *Anak dan Pendidikan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Susanto, 2013, KPAI: Narapidana Anak Berhak Dapat Pendidikan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zainuddin, Rahman, 1994, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana,

### JURNAL :

- Rohma, Fatin, *Pendidikan Untuk Anak Lapas*. 2013. Pendidikan Warga Untuk Anak Lapas, Laporan Hasil Penelitian Fundamental 2013 Tahun 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Setyawan, David, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sejak Usia Dini*, 2015. Pendidikan Nasional Sebagai Cermin Anak Bangsa 2015 Tahun. 1, Fakultas Hukum Universitas Sunan Kalijaga.

### Website :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt543e03bf71979/kapan-terpidana-anak-ditempatkan-di-lapas-orang-dewasa?>

Tabel Sistem Database Permayarakatan, 2015. Database Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil. Diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f06bd11bd1b375->,

<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/05/02/mm5jgr-pendidikan-untuk-anak-lapas>, Fatin Rohma, *Pendidikan Untuk Anak Lapas*, diakses pada tanggal 24 Maret 2015.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, Pengertian Anak, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[http://sejarah-wonosarirutan.blogspot.com/p/blog-page\\_7.html](http://sejarah-wonosarirutan.blogspot.com/p/blog-page_7.html)

<http://jogja.antaranews.com/print/333517/kemkum-ham-bangun-lembaga-pembinaan-khusus-anak-wonosari>

#### **Kamus :**

Marwan, M dan Jimmy. P, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet 1, Reality Publisher, Surabaya.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Widya Karya, Semarang*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015, *Pengertian Anak*, Wikipedia, Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahannya. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614, Menteri Negara Sekretaris Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886, Menteri Negara Sekretaris Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4235. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4301. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153. Kementerian Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3846, Jakarta.

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

PBB 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).